BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : SUARA PEMBARUAN
Subyek : Perubahan Iklim
Edisi : 8/September /2007
Hari : Sabtu
Halaman : 1

APEC Serukan Pengurangan Emisi

AS Bantu US$ 20 Juta untuk Hutan Indonesia

[SYDNEY] Negara-negara anggota Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC) menyepakati upaya-upaya mengantisipasi perubahan iklim, meskipun terjadi perdebatan sengit antara negara kaya dan negara berkembang. Kesepakatan itu dituangkan dalam dokumen yang berisi "target aspirasional" tentang pengurangan intensitas energi, namun tidak ada komitmen yang mengikat. Selain itu, dokumen juga menegaskan per- lunya peran menonjol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam perjuangan melawan perubahan iklim.

Demikian diungkapkan sumber yang terlibat dalam rangkaian perundingan, di Sydney, Jumat (7/9). Kesepakatan setebal enam halaman yang dirancang para pakar dari 21 negara anggota APEC itu, selanjutnya diproses untuk mendapatkan persetujuan dalam pertemuan para pemimpin APEC pada KTT yang berlangsung Sabtu (8/9) dan Minggu (9/9) di Sydney.

Sumber, yang merupakan pejabat senior ASEAN dan terlibat dekat dalam rangkaian negosiasi mengungkapkan, pernyataan bersama tersebut menyerukan untuk mengurangi intensitas energi hingga 25 persen pada 2030.

"Sasaran ini bersifat aspirasional, dan bukan komitmen yang mengikat. Meskipun ada sejumlah target yang dipasang menurut urutan angka, tetapi APEC bukanlah organisa- si yang bersifat mengikat," ungkap sumber itu.

Ia juga menyebutkan, pernyataan bersama diformulasikan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan proses yang sedang ditempuh PBB.

Australia sebelumnya menggembar-gemborkan tentang perubahan iklim, yang mengarah pada desakan agar negara-negara berkembang mengurangi emisi gas rumah kaca mereka. Padahal, Australia dan Amerika Serikat merupakan negara penghasil terbesar emisi gas rumah kaca, namun menolak menandatangani Protokol Kyoto tentang kesepakatan pengurangan emisi gas rumah kaca. Di sisi lain, Australia juga tidak menginginkan adanya komitmen bersifat mengikat tentang pengurangan emisi gas rumah kaca.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Pernyataan keras Australia akhirnya menyulut perdebatan sengit, setelah negara-negara berkembang yang dipimpin Tiongkok membalasnya dengan mengatakan tidak ingin diikat dengan komitmen apa pun. Mereka berpendapat, seluruh perhatian perlu difokuskan pada konferensi perubahan iklim PBB di Bali, Desember mendatang, yang bertujuan meletakkan landasan kerja bagi penyusunan sebuah perjanjian baru tentang pengurangan emisi gas rumah kaca, untuk menggantikan Protokol Kyoto yang akan habis masa berlakunya pada 2012 mendatang.

Para aktivis lingkungan hidup selama ini dibuat gerah oleh sikap Australia dan AS. Australia, yang didukung oleh AS, menilai Protokol Kyoto punya kelemahan mendasar, karena tidak membuat komitmen terhadap negara-negara berkembang, khususnya Tiongkok dan India, yang ekonominya sedang *booming*, untuk ikut bersama-sama mengurangi emisi gas rumah kaca. Australia juga berpendapat, perjanjian yang menggantikan Protokol Kyoto harus bisa menutupi kelemahan itu.

Presiden AS George W Bush sebelumnya juga mengatakan, agar kesepakatan yang menggantikan Protokol Kyoto dapat berlaku efektif, "Tiongkok harus ikut berada di meja perundingan".

Presiden Tiongkok Hu Jintao langsung menolak prasyarat-prasyarat yang diajukan AS. Dalam pernyataan Kamis (6/9), dia bersikeras bahwa hanya PBB yang seharusnya berperan menonjol menuju ke arah disepakatinya perjanjian baru tentang perubahan iklim.

Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo juga bersikap serupa, dengan mengatakan, bahwa cara yang terbaik untuk pembahasan kesepakatan pasca-Protokol Kyoto adalah melalui konferensi di Bali. "Konferensi Bali mencakup seluruh negara di dunia dan ada sejumlah karakteristik mengikat, sejumlah sifat mengikat pada resolusi-resolusi PBB, di mana APEC tidak mencakup seluruh kontributor perubahan iklim serta sifatnya juga tidak mengikat," kata Arroyo, Jumat (7/9).

Meskipun berpendapat pembahasan isu-isu perubahan iklim di APEC merupakan hal yang bagus, tetapi menurut Arroyo, resolusi terakhir perlu diletakkan pada konteks PBB.

Harapan Indonesia

Pada Sabtu (8/9) pagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu Presiden AS George Bush, menjelang pembukaan KTT APEC. Salah satu agenda yang dibahas adalah Initiative Coral Reef Triangle (Prakarsa mengenai Terumbu Karang) yang digagas Presiden Yudhoyono.

Wartawan *SP* **Yuniawan W Nugroho**, dari Sydney, Sabtu pagi melaporkan, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit itu, Presiden Bush juga menyampaikan komitmen bantuan AS senilai US$ 20 juta bagi Indonesia, untuk mengatasi masalah kehutanan. Hal itu mengingat Indonesia memiliki hutan tropis yang memerlukan penanganan dan bantuan dari dunia internasional.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Sebelumnya, Juru Bicara Departemen Luar Negeri RI Kristiarto Legowo mengatakan Pemerintah Indonesia mengharapkan dukungan negara-negara APEC terhadap upaya-upaya yang akan dilakukan pada Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim (*Meeting on Climate Change*) di Bali. "Salah satu tujuan pertemuan Bali adalah dibentuknya rezim baru tentang perubahan iklim pascausainya Protokol Kyoto pada 2012," kata Kristiarto di Jakarta, Jumat. [AFP/E-9]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup